



# PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JL. RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT TELP : 86902313 FAX : 86902314  
JAKARTA TIMUR

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA NOMOR W9-A /1706/PS.01/9/2020

### TENTANG PENUNJUKKAN TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

#### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
  - b. bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya;
  - c. bahwa mengingat adanya mutasi dan penambahan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka perlu memperbaharui dan menunjuk Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
  - d. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan perlu ditunjuk pejabat fungsional dan pejabat struktural untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Pembina dan Pengawas tersebut;
  - e. bahwa Hakim Tinggi dan pejabat fungsional dan struktural sebagaimana yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas Pembina dan Pengawas Daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/013/SK/III/1988 Tentang Pola Bindalmin Peradilan Agama;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/ SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan.
17. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 mengenai Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Pengadilan Agama;
18. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor 71/KMA/SK/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tentang Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020;
- KETIGA** : Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/946/PS.01/6/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 3 September 2020  
 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Ketua,



**Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. A**  
 NIP. 19541231.198103.1.092

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Agama Se DKI Jakarta.

Lampiran Surat Keputusan  
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
 Nomor : W9-A/1706/HM.02.3/9/2020  
 Tanggal : 3 September 2020

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
 TENTANG PENUNJUKKAN TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Pengarah Pengawasan : Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.  
 Koordinator Pengawasan : Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M.Hum.

**1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<b>A</b>	1. Drs. H.A. Agus Bahauddin, M.Hum.	- Hakim Tinggi	- Ketua
	2. Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi	- Anggota
	3. H. Sunarto, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi (Koord. SIPP dan IT)	- Anggota
	4. Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi	- Anggota
	5. Drs. Muhammad Yamin, M.H.	- Panitera	- Anggota
	6. Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.	- Sekretaris	- Anggota
	7. Ratu Dhiyafah, S.H.	- Panitera Pengganti	- Sekretaris
	8. Dewi Utari, S.E., M.M.	- Ka. Sub. Bag. Keuangan dan Pelaporan	- Asisten
	9. Dina Marisa, S. Kom	- Pranata Komputer	- Asisten

**2. Pengadilan Agama Jakarta Timur**

TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<b>B</b>	1. Drs. H. Abubakar, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi	- Ketua
	2. Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.	- Hakim Tinggi	- Anggota
	3. Drs. Dadang Syarif	- Hakim Tinggi	- Anggota
	4. Drs. H.M. Arsyad, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi (Koord. SIPP dan IT)	- Anggota
	5. Drs. Muhammad Yamin, M.H.	- Panitera	- Anggota
	6. Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.	- Sekretaris	- Anggota
	7. Abdullah, S.H., M.H.	- Panitera Muda Hukum	- Sekretaris
	8. Hj. Nastiti Dewi, S.H.	- Panitera Pengganti	- Asisten
	9. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.	- Ka. Sub. Bag. Tata Usaha&Rmh Tangga	- Asisten

**3. Pengadilan Agama Jakarta Utara**

TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<b>C</b>	1. Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.	- Hakim Tinggi	- Ketua
	2. Drs. Muchtarom, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi	- Anggota
	3. Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi	- Anggota
	4. Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi (Koord. SIPP dan IT)	- Anggota
	5. Drs. Muhammad Yamin, M.H.	- Panitera	- Anggota
	6. Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.	- Sekretaris	- Anggota
	7. Aday, S.Ag., M.H.	- Panitera Pengganti	- Sekretaris
	8. H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I., M.H.	- Panitera Pengganti	- Asisten
	9. Yulita Fitri Hartaty, S.E	- Ka. Sub. Bag. RenProg & Anggaran	- Asisten

#### 4. Pengadilan Agama Jakarta Barat

TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
D	1. Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi (Koord. SIPP dan IT)	- Ketua
	2. Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi	- Anggota
	3. Dra. Hj. Kamariah, S.H, M.H.	- Hakim Tinggi	- Anggota
	4. Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H	- Hakim Tinggi	- Anggota
	5. Drs. Muhammad Yamin, M.H.	- Panitera	- Anggota
	6. Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.	- Sekretaris	- Anggota
	7. Hj. Ghizar Fau'ah, SH. MH	- Panitera Muda Banding	- Sekretaris
	8. Elvira Amegia, M. Kom.	- Ka. Sub. Bag. Kepeg & TI	- Asisten
	9. Hadi Putra, A.Md	- Staf Sub Bag Keuangan dan Pelaporan	- Asisten

#### 5. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
E	1. Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.	- Hakim Tinggi (Koord. SIPP dan IT)	- Ketua
	2. Dra. N. Munawaroh, M.H	- Hakim Tinggi	- Anggota
	3. Drs. H. Muri, S.H., M.M.	- Hakim Tinggi	- Anggota
	4. Drs. Muhammd Yamin, M.H.	- Panitera	- Anggota
	5. Drs. Erwin Widanarko, SH., S.A.P., M.Pd.	- Sekretaris	- Anggota
	6. Timur Abimanyu, S.H., M.H.	- Panitera Pengganti	- Sekretaris
	7. Restiana Irwanti, S.E.	- Staf Sub Bag Keuangan dan Pelaporan	- Asisten

Jakarta, 3 September 2020  
 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
 Ketua,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. *A*  
 NIP. 19541231.198103.1.092